

- 2) Untuk memberikan kejelasan terhadap hasil putusan mahkamah konstitusi terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 perubahan pasal 170 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dibutuhkan kejelasan mekanisme bagi Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan izin cuti oleh Presiden seperti pejabat lainnya yang dikecualikan memundurkan diri dari jabatannya sebelum perubahan dalam pasal tersebut .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Gunung Agung. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Riza Noer, Arfani. 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jimly, Ashiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konstitusi Press. Jakarta.
- 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

- . 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- S. Prajudi, Atmostidirjo. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Achmad, Fauzan. 2009. *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*. Kencana. Jakarta.
- Firdaus, 2015. *Constitutional Engineering Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*. Yrama Widya. Bandung.
- Munir, Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2010. *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama. Jakarta.
- Affan, Ghaffar. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yahya, Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ni'matul, Huda. 2019. *Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- S.F Marbun. dan Moh. Mahfud MD. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Jakarta.
- Sri Soedewi, Masjchon. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung.
- Sri, Pudiyatmo. 2007. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Rezeki Press. Bandung.
- Ridwan H, R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo. Jakarta.
- 2003. *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti,. 1992. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Ridwan, Juniarto dan Sudrajat, Achmad Sodik. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung.
- Siahaan, Maruarar. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Spelt, N.M. dan Berge, J.BJ.M. Ten. 1992. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya.
- Subekti, R. 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.  
1979. *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Jakarta.
- Adrian, Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Andrian, Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Jakarta.
- Titik Triwulan, Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana. Jakarta.
- Ubaidillah A. dan Ahmad, Rozak. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

### **Peraturan dan Putusan**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2020 terkait pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.

### **Artikel**

- A. Mukthie, Fadjar, 2009. "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU". Jurnal Konstitusi, Mahkamah Kostitusi. Vol. 6 No. 1.
- Fuqoha, 2017, "*Pengisian jabatan presiden dan Presidential Threshold dalam demokrasi konstitusional di Indonesia*", Jurnal Ajudikasi vol 1 no 2, Universitas Serang Raya.
- J Jeremy Wisnewski (Ed), 2014. "Review Journal of Political Phylosophy" Vol. 11, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
- Yusmiati, 2018. "Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-undang Dasar 1945", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 4.No.1.

### **Pidato**

Jimly, Asshiddiqie. 2011. "*Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*", Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47. Jember.